



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : RSJKO ENGKU HAJI DAUD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASEP GUNTUR SAPARI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **163652**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.160.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah Seluas 888 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 86 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 228.000.000**

1. MOBIL, NISSAN PATROL NON BLOCK X /JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 76.000.000
2. MOBIL, JIMNY JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 47.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NOUVO MX Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, TOYOTA IPSUM Tahun 1998, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
5. MOTOR, HONDA VIERZA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
6. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 464.000.000**

D. SURAT BERTARTAMBA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.900.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.871.900.000
III. HUTANG	Rp.	2.060.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.811.900.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.